

Makalah

**“Dampak Era Globalisasi Terhadap Perubahan Peran
Akuntan dan Kurikulum Pendidikan Akuntansi”**

Disusun Oleh:

Dede Abdul Hasyir, SE.Ak
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UNPAD

Disampaikan pada

**Seminar dan Lokakarya Pengembangan Kurikulum
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
STIE Indonesia Membangun (INABA)**

Bandung, 18 Desember 2006

Abstrak

Dinamika yang terjadi dalam profesi akuntan telah mendorong akuntan untuk meningkatkan kualitasnya. Perubahan terjadi seiring tingginya tuntutan akan perbaikan citra profesi yang diakibatkan oleh munculnya berbagai skandal keuangan di beberapa perusahaan utama dunia. Skandal tersebut terjadi di negara yang justru mengklaim dirinya sebagai negara dengan tingkat pengelolaan (*governance*) yang paling baik, yaitu Amerika Serikat.

Hikmah yang dapat diambil dari adanya tuntutan tersebut adalah pembenahan sistem akuntansi secara besar-besaran di seluruh dunia. Pembenahan tersebut terutama dikaitkan dengan perlunya peningkatan sistem pengendalian internal, peningkatan keamanan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi informasi, peningkatan sistem audit, dan peningkatan mekanisme monitoring profesi.

Dampak tersebut secara langsung dan tidak langsung juga terasa di Indonesia. Di samping imbas tersebut, di dalam negara Indonesia sendiri terjadi sejumlah dinamika yang perlu mendapatkan perhatian dari profesi akuntan dan pendidikan akuntansi. Diantaranya adalah perkembangan otonomi daerah yang memerlukan profesi akuntan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan-perubahan yang terjadi dan tuntutan-tuntutan yang diarahkan kepada profesi akuntan, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menuntut pula dunia pendidikan akuntansi yang mencetak tenaga-tenaga akuntan. Pendidikan yang dimaksud terutama adalah pendidikan tinggi akuntansi yang mencetak sarjana-sarjana akuntansi. Berbagai tuntutan yang ada mengharuskan pendidikan tinggi akuntansi melakukan modifikasi dan penyesuaian atas kurikulum pendidikannya. Hal ini ditujukan agar perguruan tinggi dapat menghasilkan akuntan-akuntan yang handal, cakap, dan mampu menghadapi tuntutan era globalisasi.

Daftar Isi

Abstrak	hal. 2
Daftar Isi	hal. 3
Bab I Pendahuluan	hal. 4
Bab II Tinjauan Profil Akuntan Indonesia	hal. 8
Bab III Peran Akuntan Indonesia di Era Globalisasi	hal. 10
3.1. Pertanyaan Pokok Soal Peran Akuntan	hal. 10
3.2. Kondisi Transisional di Dalam Negeri	hal. 10
3.3. Dimensi Internasional dan Globalisasi	hal. 12
3.4. Perumusan Peran Akuntan Indonesia	hal. 14
3.5. Beberapa Langkah yang Perlu Dilakukan	hal. 15
3.6. Peluang Otada Bagi Aktualisasi Peran Akuntan	hal. 18
Bab IV Perubahan Kurikulum Pendidikan Akuntansi	hal. 20
4.1. Tujuan Pendidikan Akuntansi	hal. 20
4.2. Kurikulum Pendidikan Tinggi S1 Akuntansi	hal. 21
Bab V Kesimpulan	hal. 26
Daftar Pustaka	hal. 27

Bab I

Pendahuluan

Perdagangan bebas yang merupakan tanda era globalisasi sudah di depan mata. *Globalization is a reality, not a choice* (Gernon & Meek, 2001:vi, seperti dikutip Idham Samudra Bey, 2002). Disamping itu, globalisasi perekonomian dan perdagangan menimbulkan peluang sekaligus ancaman bagi negara yang ikut menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Dr. Imam Ghozali, 2003, seperti dikutip Idham Samudra Bey, 2002). Apakah siap atau tidak, warga dunia harus menghadapi era ini seiring telah disepakatinya berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Untuk kawasan Asia Pasifik, kesepakatan APEC mengindikasikan dimulainya perdagangan bebas pada Tahun 2010 untuk negara-negara maju dan Tahun 2020 untuk negara-negara berkembang. Sedangkan untuk negara-negara ASEAN, perjanjian serupa terbentuk dalam format *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang sedianya dimulai pada tahun 2003 ini. Begitu pula dengan kawasan Amerika Utara, sebagaimana terbentuknya kesepakatan *North Free Trade Area* (NAFTA) dan kawasan Eropa dengan *European Union*-nya. Sampai saat ini, masih dipertanyakan tentang kesiapan masyarakat dunia dalam menghadapi perdagangan bebas, terlebih masyarakat Indonesia. Petani gula di Jawa Tengah misalnya, prospek daya saing produknya masih rendah bila dibandingkan dengan produk impor (Gubernur Jawa Tengah dalam Harian *Suara Merdeka*, 16 November 2002).

Sementara itu, kesiapan pada entitas setingkat negara pun menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Sebagai contoh untuk perjanjian APEC, dalam pertemuan yang diadakan di Filipina, terlihat reaksi ketidaksiapan dari negara-negara anggota. Dalam pertemuan tersebut, setiap anggota harus mengajukan *Individual Action Plan* (IAP). Dan ternyata sebagian besar anggota tidak

mengusulkan hal-hal yang baru dalam IAP yang diajukannya. Dalam IAP yang diusulkan Indonesia misalnya, tarif (pajak impor) yang ketika itu masih lebih dari 20% baru akan diturunkan sampai maksimum 10% pada tahun 2003. Begitu pula dengan Jepang yang mundur selangkah dari komitmen Osaka, dengan merubah tarif maksimum dari 5% menjadi 10%.

Adalah dunia profesi yang turut mendapat dampak dari adanya perdagangan bebas ini. Saat ini, *World Trade Organization* telah mengatur 40 profesi yang akan bebas terbuka untuk semua negara yang dikelompokkan dalam 6 kelompok profesi yaitu: pengacara, akuntan, *profesional services*, *personal computer services*, *tourism services*, dan *medicine services*. Sedangkan dalam pertemuan AFA di Yangoon disepakati bahwa liberalisasi jasa akuntansi di kawasan ASEAN diserahkan kepada masing-masing negara secara bilateral. Permasalahan yang menjadi hambatan adalah perbedaan aturan dan kebijakan setiap negara. Lebih spesifik, hal itu menyangkut sistem akuntansi dan audit. Menurut Djoko Susanto, salah seorang delegasi dari Indonesia dalam pertemuan tersebut, pemberlakuan jasa auditing untuk kawasan ASEAN masih jauh (*Media Akuntansi*, Pebruari-Maret 2003).

Untuk ke depan, profesi akuntan memang dihadapkan pada tantangan bagaimana meningkatkan *value* dunia bisnis agar bisa *survived* di era perdagangan bebas. Dalam meninjau dunia korporasi di Indonesia, ada hal yang patut menjadi pertanyaan: faktor-faktor apa yang menyebabkan daya saing sebagian perusahaan nasional belum optimal bila dibandingkan dengan perusahaan luar? Penyebabnya banyak. Bila dicermati, salahsatunya adalah mengenai operasi perusahaan luar negeri yang aspek *governance*-nya lebih baik. Pelaksanaan *good governance* telah membiasakan perusahaan untuk berbisnis secara sehat dan *aware* terhadap berbagai resiko (sebagaimana *good governance* sangat *concern* terhadap *risk management*). Dengan pengelolaan resiko yang lebih baik, maka sebagian biaya (seperti biaya modal) dapat ditekan sehingga tercapai

efisiensi operasi. Keunggulan ini telah berkontribusi dalam menghasilkan output: *high quality product with lower price*.

Sedangkan sebelum diberlakukannya perdagangan bebas, keunggulan komparatif (harga murah) tersebut masih terbendung oleh tarif impor dan *barrier-barrier* lain. Sehingga ketika produk itu sampai ke dalam negeri, *final price*-nya sudah tidak bersaing lagi. Dengan demikian, daya serap konsumen menjadi tidak terlalu besar dan produk sejenis yang dihasilkan produsen dalam negeri masih dapat *berjaya* dalam peta persaingan produk. Namun tidak demikian adanya ketika perdagangan bebas dimulai. Setiap produk akan secara *fair* bersaing tanpa mengenal batasan negara mengingat dihilangkannya *barrier-barrier* perdagangan antar negara. Sebuah kondisi yang tidak menyenangkan bagi negara seperti Indonesia. Jangankan setelah perdagangan bebas, dalam beberapa dekade terakhir ini pun, telah terjadi perubahan tren konsumsi masyarakat. Dalam persepsi masyarakat, produk luar diyakini memiliki kualitas yang lebih baik.

Pembahasan peran akuntan Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi dan kondisi transisional yang dihadapi negeri ini, serta kondisi global yang melingkupinya. Krisis multidimensi yang menghantam Indonesia, yang diawali dengan krisis moneter Juli 1997, telah menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam masyarakat Indonesia, termasuk perubahan dalam struktur sosial-budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan-keamanan.

Perubahan-perubahan di dalam negeri ini terkait secara dinamis dengan berbagai perubahan global, yang terus berlangsung sampai sekarang. Pertengahan 2002 ini, misalnya, dunia finansial dikejutkan oleh skandal akuntansi terbesar di Amerika, yang berujung pada jatuhnya perusahaan energi raksasa Enron Corp. Harga sahamnya yang beberapa bulan sebelumnya mencapai puluhan dollar AS, dan nilai perusahaannya yang mencapai 48 milyar dollar AS, kini nyaris tak ada harganya.

"Keuntungan-keuntungan" yang tertera dalam laporan keuangan Enron beberapa tahun terakhir ternyata adalah kerugian-kerugian yang didandani sedemikian rupa, dengan trik akuntansi yang canggih. Kini, pemegang saham Enron yang mayoritasnya dipegang oleh publik siap menuntut seluruh komponen yang dianggap bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan tersebut, termasuk kantor akuntan publik Arthur Andersen.

Sulit dipercaya, skandal ini terjadi di Amerika, yang mengklaim diri sebagai pelopor *good corporate governance* dengan transparansinya, serta memiliki sistem audit dan pelaporan keuangan yang canggih. Kalau di Amerika, yang sudah sangat maju saja, bisa terjadi penyimpangan informasi publik oleh kalangan akuntan yang begitu parah, bagaimana pula di Indonesia, yang baru belajar tentang *good corporate governance* dan transparansi sejak gerakan reformasi 1998.

Bab II

Profil Akuntan Indonesia

Membandingkan posisi akuntan Amerika dengan Indonesia mungkin terlalu jauh. Karena kenyataannya, sampai saat ini Indonesia masih berkuat dengan banyak persoalan kompleks, yang berkaitan dengan krisis multidimensi. Dalam politik pemerintahan, misalnya, sejak gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa menjatuhkan Presiden Soeharto, Mei 1998, Indonesia sudah tiga kali berganti Presiden. Sejak jatuhnya Soeharto, pentas politik Indonesia tak pernah betul-betul stabil. Stabilitas baru agak membaik di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pemulihan ekonomi nasional dari kondisi krisis sudah berlangsung pesat di negara-negara tetangga, namun sebaliknya di Indonesia terasa berjalan sangat lamban. Upaya penyelesaian krisis ini dipersulit oleh kondisi keamanan yang kurang mantap di beberapa daerah. Seperti: maraknya gerakan separatisme, bentrokan horisontal antarkelompok masyarakat, aksi teror bom, dan sebagainya.

Selain itu, juga ada perkembangan baru dalam pemerintahan. Otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan kemudian menjadi tren, yang diwujudkan dalam pembentukan berbagai provinsi dan kabupaten baru. Implikasi dari kebijakan ini adalah bergesernya kegiatan ekonomi ke daerah-daerah, yang diiringi dengan sesekali tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengembangkan sistem dan prosedur sendiri bagi sistem pelaporan keuangan. Ini sangat tepat dalam konteks desentralisasi fiskal dan upaya menciptakan reformasi keuangan di daerah. Berbagai perkembangan baru ini pada gilirannya menciptakan tantangan, sekaligus peluang, bagi para akuntan Indonesia untuk mengaktualisasikan perannya.

Praktek akuntan di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak zaman Hindia Belanda, tahun 1642. Akuntan-akuntan Belanda tersebut mendirikan perusahaan-perusahaan yang juga dimonopoli kaum penjajah, sampai abad ke-19. Sesudah Belanda terusir oleh masuknya tentara pendudukan Jepang, mulai dikenal kursus ajun akuntan di Jakarta oleh Departemen Keuangan, yang bisa dinikmati warga Indonesia.

Sesudah Indonesia merdeka, pembentukan Ikatan Akuntan Indonesia dirintis pada tahun 1957 oleh sejumlah akuntan lulusan pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulusan Belanda. Pada tahun-tahun inilah, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Dengan pulangnya akuntan-akuntan Belanda ke negerinya, peran para akuntan Indonesia pun semakin berkembang. Perkembangan itu semakin pesat setelah diresmikannya kegiatan pasar modal, 10 Agustus 1977, yang menjadikan akuntansi keuangan sangat penting.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat pada awal periode Orde Baru, serta tumbuhnya berbagai perusahaan dan jenis usaha, peran akuntan Indonesia pun makin berkibar. IAI sendiri sebagai organisasi juga berkembang pesat, dengan anggota sekitar 5.000 orang, terdiri dari akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan yang bekerja di sektor pemerintah. Jumlah anggota ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Keanggotaan IAI sebenarnya masih dapat ditingkatkan, karena jumlah akuntan Indonesia yang terdaftar dan memiliki register seluruhnya adalah 16.000 orang.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang seiring dengan peningkatan peran akuntan Indonesia itu, sayangnya tidak berlanjut mulus karena hantaman krisis ekonomi, yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Bagaimanapun, krisis ini telah membuka mata kita tentang pengaruh globalisasi terhadap ekonomi Indonesia, selain membuktikan masih lemahnya fundamental ekonomi nasional selama ini.

Bab III

Peran Akuntan Indonesia di Era Globalisasi

3.1. Pertanyaan Pokok soal Peran Akuntan

Dari penjabaran kondisi tersebut, ada sejumlah pertanyaan pokok yang dapat diajukan, dalam kaitannya dengan posisi akuntan Indonesia. Yakni: Peran dan kontribusi apa yang dapat diberikan oleh para akuntan Indonesia umumnya, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) khususnya, dalam memulihkan kembali Indonesia dari keterpurukan, di tengah berbagai pengaruh dan tantangan globalisasi?

Hal kedua, kendala atau masalah apa saja yang dihadapi akuntan Indonesia, dalam upaya mewujudkan peran dan kontribusi tersebut? Dan terakhir, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh akuntan Indonesia ataupun institusi IAI, untuk mengatasi berbagai kendala dan masalah tersebut? Jawaban yang jelas dan jernih atas tiga pertanyaan kunci ini akan sangat mempengaruhi gerak dan langkah para akuntan Indonesia selanjutnya. Bukan tidak mungkin, jawaban tersebut akan ikut menentukan, seberapa cepat negeri ini akan bangkit kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan.

3.2. Kondisi Transisional di Dalam Negeri

Sebelum merumuskan peran dan kontribusi akuntan Indonesia, tentu kita harus memahami secara lebih spesifik, apa saja bentuk tantangan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dewasa ini, serta kaitannya dengan kondisi global. Pemahaman ini penting, karena peran dan kontribusi akuntan Indonesia --yang hendak dirumuskan tersebut-- bukanlah sesuatu yang diadakan, melainkan sesuatu yang diharapkan mampu diaktualisasikan, guna menjawab tantangan dan permasalahan secara proporsional. Permasalahan yang dibahas pada tulisan ini akan lebih terfokus pada isu ekonomi, tanpa menafikan

bahwa krisis yang menimpa Indonesia saat ini juga dipengaruhi faktor-faktor lain. Peran akuntan Indonesia di sini akan lebih ditekankan pada bidang ekonomi, yang memang relevan dengan kompetensinya.

Di bidang ekonomi, upaya mereformasi sistem ekonomi Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Peran internasional melalui Dana Moneter Internasional (IMF), dalam pembenahan ekonomi Indonesia, sangat dominan. Namun berbagai langkah yang diusulkan IMF justru memperburuk kondisi ekonomi. Di sisi lain, begitu banyak kepentingan para elite politik dan ekonomi yang dikedepankan, sehingga menghasilkan langkah-langkah yang tidak konsisten dan tidak efektif dalam mereformasi ekonomi.

Baru akhir-akhir ini ekonomi Indonesia menunjukkan sedikit kecenderungan membaik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,8 persen pada tahun 2000 dan 3,4 persen pada tahun 2001, jauh di atas perkiraan lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, yang hanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kurang dari 2,5 persen. Pertumbuhan ini penting untuk menggerakkan kembali sektor riil yang mandeg lama akibat krisis. Geliat sektor riil, yang menjadi salah satu lahan bagi peranserta akuntan Indonesia, akan memberi sumbangan berarti bagi pemulihan ekonomi.

Meskipun ada sedikit tanda-tanda menggembirakan, perbankan nasional sayangnya belum pulih dari krisis dan belum menjalankan perannya secara normal sebagai lembaga intermediasi. Pertumbuhan kredit sangat kecil bahkan sebagian mengalami pertumbuhan minus. Kredit bermasalah (non performing loan – NPL) kembali membengkak, sehingga banyak bank yang didera kerugian dan modalnya kembali tergerus.

Penyebab utama belum pulihnya perbankan dari krisis adalah kondisi ekonomi makro yang belum mendukung. Suku bunga masih tinggi, rupiah belum stabil benar, laju inflasi masih tinggi, dan sebagian besar perusahaan belum direstrukturisasi utangnya.

3.3. Dimensi Internasional dan Globalisasi

Selain permasalahan transisional dalam reformasi ekonomi di dalam negeri, juga ada aspek-aspek internasional dan globalisasi yang berpengaruh signifikan. Upaya pemulihan ekonomi Indonesia tak bisa dilepaskan dari konteks globalisasi, di mana saling-pengaruh antara berbagai aktor ekonomi terjadi. Dalam menghadapi era globalisasi, sistem akuntansi yang berkualitas adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sistem akuntansi yang terintegrasi akan membawa bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya pencatatan yang tertib dan andal, menghasilkan adanya kepastian yang bisa dianalisis. Pelaku bisnis dapat menghitung aset, aktivitas dan kecenderungan usahanya. Terintegrasinya hal-hal ini membuat perencanaan dapat dilakukan.

Namun survei tahun 1999, yang dilakukan PricewaterhouseCoopers terhadap investor-investor internasional di Asia, menunjukkan, Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi, serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Sebuah kajian lain juga menunjukkan, tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara.

Sebagai gambaran, meskipun mungkin tidak terkait langsung dengan penilaian PricewaterhouseCoopers tersebut, angka persetujuan investasi asing (PMA) di Indonesia selama semester pertama tahun 2002 anjlok 42% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2001. Yakni, penurunan dari nilai investasi 4,3 miliar menjadi 2,5 miliar dollar AS. Kemerosotan investasi tersebut terutama disebabkan persepsi investor yang masih negatif terhadap Indonesia, dan tidak adanya kebijakan dan inisiatif baru yang pro-investasi karena konservatisme otoritas keuangan.

Selain itu, negara seperti Cina, Vietnam dan Thailand, sebagai lokasi investasi asing di kawasan Asia, juga semakin kompetitif. Rating Indonesia,

seperti ditunjukkan oleh Long Term Foreign Currency Rating Standard&Poors, merosot tajam sejak krisis akhir tahun 1997, sampai mencapai rating terendah Selective Default (SD). Sejak Oktober 2000, dengan berbagai langkah proaktif dalam bidang ekonomi, rating Indonesia meningkat tiga tingkat menjadi B minus. Namun sejak masa Kabinet Gotong Royong, rating Indonesia kembali anjlok berturut-turut tiga tingkat, sehingga saat ini menjadi Selective Default. Rating yang rendah tersebut menyebabkan biaya pendanaan (cost of fund) dari pinjaman komersial Indonesia meningkat.

Secara kasar, Indonesia digolongkan sebagai negara (jurisdiction) yang mempunyai mekanisme pengawasan lemah terhadap sistem keuangan, sehingga mudah disusupi oleh aktivitas kriminal. Data FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) per April 2002, menyebutkan, Indonesia bersama 18 negara lainnya –seperti Israel, Filipina, Rusia dan Mesir-- masih dimasukkan dalam daftar negara-negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang (Non-Cooperative Countries and Territories - NCCTs). Meskipun FATF tidak memiliki wewenang secara hukum internasional untuk menindak negara-negara yang dianggap non-kooperatif dalam soal pemberantasan pencucian uang, implikasi dari masuknya sebuah negara dalam NCCTs sangatlah besar.

Sorotan FATF mendapat penegasan dengan pernyataan dari Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia, pada 11 Agustus 2002, bahwa pihaknya menerima 40 laporan mengenai transaksi yang mencurigakan dari dua bank asing dan lima bank domestik. Pihak Bank Indonesia (BI) tidak merinci nama bank-bank itu, dengan alasan rahasia perbankan. Namun BI menyebutkan, tujuh bank itu termasuk yang kooperatif terhadap peraturan BI dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Toh BI tetap berencana untuk memeriksa on the spot bank bersangkutan.

Selain berbagai sorotan dari dunia internasional tersebut, dari dalam negeri sendiri juga muncul kritik yang cukup santer. Hasil penelitian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang kemudian disampaikan dalam diskusi terbatas dengan IAI, mengungkapkan beberapa hal yang patut diperhatikan para akuntan. Penelitian ini menggunakan basis faktor disclosure, yang tersebar dalam sejumlah peraturan Bapepam, yang wajib disampaikan kepada publik. Ternyata, persentase yang kurang di bawah ekspektasi benchmark kepatuhan menunjukkan, hampir semua emiten tidak menjalankan dan tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi kepada investor. Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut, pertanggungjawaban yang paling dipertanyakan adalah tanggung jawab akuntan publik, yang menyampaikan laporan keuangan, atau menjadi pihak yang seharusnya menyampaikan aspek keterbukaan kepada emiten.

Tetapi, seperti diungkapkan seorang pengamat di pasar modal, memang banyak rambu yang belum jelas dalam penyampaian laporan keuangan. Akibatnya, trik-trik laporan keuangan pun dilakukan emiten dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang masih lemah. Sektor korporasi Indonesia memang harus segera membenahi perilakunya, jika tidak ingin terjadi krisis kedua.

3.4. Perumusan Peran Akuntan Indonesia

Setelah melihat paparan kondisi krisis transisional di dalam negeri, serta mempertimbangkan berbagai aspek internasional dan globalisasi, mulai tampak jelas peran yang bisa diambil para akuntan Indonesia. Peran akuntan Indonesia adalah ikut serta secara aktif dalam proses pembenahan, perbaikan, dan pada akhirnya pemulihan perekonomian nasional, dengan memperhatikan berbagai konstelasi global yang terkait.

Peran serta tersebut harus diwujudkan melalui pemantapan profesionalisme serta penegakan kode etik akuntan, yang saat ini justru mendapat sorotan keras dari masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para akuntan Indonesia dituding –minimal secara moral-- ikut bertanggungjawab atas terjadinya keterpurukan ekonomi. Walaupun disadari pula, krisis yang melanda Indonesia ini punya dimensi eksternal, dan juga menghantam keras negara-negara Asia Timur lainnya.

Tudingan lain muncul dari sejumlah kalangan, yang prihatin melihat kelemahan para akuntan Indonesia dalam penegakan standar akuntansi dan kode etik profesi. Padahal komitmen untuk menegakkan standar dan kode etik tersebut justru sangat dibutuhkan, untuk menghidupkan lagi berbagai sektor ekonomi. Tentu, tidak semua kalangan sependapat dengan tudingan lemahnya standar akuntansi ini. Salah seorang praktisi akuntansi Indonesia, misalnya, berpendapat, Sistem Standarisasi Akuntansi yang diterapkan di Indonesia sudah memadai, sehingga sulit bagi perusahaan keuangan untuk memalsukan fakta yang berkaitan dengan informasi publik. Dalam berbagai kasus penyimpangan informasi yang dituduh dilakukan oleh akuntan publik, kesalahan biasanya dilakukan oleh akuntannya, bukan institusi.

Kerasnya sorotan dan tudingan itu mungkin terasa berlebihan dan kurang mengenakan bagi kalangan akuntan Indonesia. Bagaimanapun, tidak ada salahnya semua itu dijadikan masukan, serta bahan introspeksi, dalam merancang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan, demi perbaikan citra profesi akuntan Indonesia.

3.5. Beberapa Langkah yang Perlu Dilakukan

Kita tahu bahwa IAI, sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia, tidaklah berpangku tangan saja menghadapi santerinya kritik dan sorotan terhadap perilaku etis akuntan Indonesia. IAI dengan segala cara telah berupaya

menegakkan etika profesi bagi akuntan. Etika profesi akuntan di Indonesia telah diatur dalam kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari kode etik umum akuntan Indonesia, kode etik kompartemen dan interpretasi kode etik kompartemen. Kode etik ini mengikat anggota IAI di satu sisi, dan dapat pula dipergunakan oleh akuntan lain yang bukan atau belum menjadi anggota IAI.

Namun, dengan berbagai upaya penegakan kode etik itu, IAI mengakui, sikap dan perilaku tidak etis dari sejumlah akuntan masih tetap terjadi. Tentang sikap dan perilaku akuntan yang melanggar etika profesi ini, sebenarnya sudah ada penelitian serius, yang dilakukan oleh Maryani dan Ludigdo (2001) dari Universitas Brawijaya. Maryani dan Ludigdo menunjukkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perilaku etis akuntan, dan dua faktor yang memiliki persentase terbesar adalah religiusitas dan pendidikan. Menurut sebagian besar akuntan yang menjadi responden penelitian ini, pembinaan moral dan etika dianggap perlu, bahkan sangat perlu, dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme akuntan.

Dari penelitian ini terlihat pentingnya pendidikan akuntansi (pendidikan formal). Faktor pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku etis akuntan, sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan), tetapi juga mendidik mahasiswa agar memiliki kepribadian (*personality*) yang utuh sebagai manusia. Penelitian Hildebeitel dan Jones (1992) menunjukkan, pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh pengintegrasian etika ke dalam mata kuliah yang diajarkan.

Berdasarkan sejumlah hasil penelitian tersebut, agaknya tidak berlebihan jika direkomendasikan perlunya dilakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam, serta kebijakan yang terpadu, dalam menata kembali pendidikan akuntansi di Indonesia. Tujuannya, agar pendidikan akuntansi di Indonesia dapat menghasilkan para akuntan yang betul-betul profesional, teguh memegang kode

etik profesi, kapabel, serta selalu siap dan tanggap menghadapi berbagai tantangan.

Selain penekanan dari aspek etika, aspek transformasi ilmu pengetahuannya sendiri tentu tak boleh ditinggalkan dalam pendidikan tinggi akuntansi. Hal ini menjadi penting dan krusial, karena di masa mendatang akan semakin banyak bentuk praktik transaksi bisnis baru, yang dipicu oleh perkembangan pesat teknologi informasi (TI). Paradigma profesi akuntan di era milenium baru ini tak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. TI berperan dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. TI juga berperan dalam pendidikan akuntansi, audit dan jasa atestasi lain, serta pengendalian atas transaksi elektronik.

Perubahan lingkungan bisnis global, yang diwarnai dengan penerapan TI terkini di semua lini tersebut, pada akhirnya menuntut setiap perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi, jika mau *survive* dan terus berkembang. Di sini, sekali lagi, para akuntan Indonesia dituntut harus menunjukkan kompetensinya.

Semua usulan tindakan tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan IAI. Antara lain: Mengembangkan dan menjaga peran profesi akuntan dalam masyarakat, sesuai dengan perkembangan zaman; memelihara martabat dan kehormatan profesi akuntan; serta meningkatkan kecakapan dan tanggung jawab profesional anggota.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah mendorong para akuntan Indonesia, agar lebih tanggap dan meluas dalam pendekatannya ke lahan garapan, yang sekaligus juga merupakan lahan pengabdian. Para akuntan Indonesia tidak hanya diharapkan berkiprah di perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Struktur industri di Indonesia menunjukkan, jumlah perusahaan kecil, menengah dan koperasi justru jauh lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, keberhasilan dalam memberdayakan UKM

dan koperasi akan memberi arti penting dalam pengembangan perekonomian nasional dan pemerataan kemakmuran.

Sebagai contoh, saat ini banyak UKM yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit, akibat tidak jelasnya sistem akuntansi mereka. Bagaimana pihak luar negeri bisa melihat track record suatu perusahaan, dan tertarik untuk menanam investasi, jika laporan keuangannya saja tidak ada? Dari sekitar 6,633 juta UKM di Jawa Timur, hanya UKM dengan omzet antara Rp 500 juta hingga Rp 5 milyar yang kemungkinan memiliki laporan keuangan. Selain 3.000 UKM dengan omzet Rp 500 juta – Rp 1 milyar dan 2.195 UKM dengan omzet Rp 1 milyar – Rp 5 milyar, sisanya tidak memiliki laporan keuangan.

Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kredit. Pada gilirannya, perluasan lahan bagi peran akuntan Indonesia semacam ini akan memberi efek berganda. Selain menguntungkan bagi pelaku ekonomi bersangkutan, pemerintah pun akan mendapat keuntungan jika perusahaan-perusahaan menggunakan sistem akuntansi yang baik. Dari pendekatan praktis, adanya laporan keuangan yang transparan, di sisi lain akan meningkatkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Selama ini pemungutan pajak tidak optimal karena beberapa hal. Meskipun unsur manusia sangat penting, adanya perangkat sistem akuntansi -- yang memungkinkan terwujudnya transparansi—dapat mengurangi kebocoran-kebocoran. Saat ini *tax ratio* di Indonesia baru mencapai sekitar enam persen, jauh di bawah Filipina dan Singapura yang masing-masing 24 dan 27 persen. Kalau *tax ratio* naik secara signifikan, Indonesia mungkin tak perlu terlalu tergantung pada pinjaman IMF dan bisa menolak didikte oleh mereka.

3.6. Peluang Otonomi Daerah Bagi Aktualisasi Peran Akuntan

Selain berbagai kendala dan tantangan, perubahan-perubahan kondisi -- akibat dinamika lokal di dalam negeri dan yang dihadirkan oleh era globalisasi—pada saat yang sama juga menghadirkan peluang-peluang baru bagi akuntan

Indonesia. Peluang ini penting bagi akuntan Indonesia, dalam upaya lebih mengaktualisasikan peran dan kontribusinya. Salah satu peluang itu adalah dalam otonomi daerah. Dengan adanya desentralisasi ekonomi, daerah kini dipacu untuk mengelola keuangannya sendiri secara efektif dan efisien. Pada saat yang sama, ada tuntutan dari masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah itu bersifat transparan, mulai dari penerimaan sampai pembelanjannya. Berkaitan dengan hal itu, mulai tahun anggaran 2003 akan banyak daerah kabupaten yang akan mengubah sistem penyusunan laporan keuangannya, dari pola lama ke pola baru. Saat ini, baru dua pemerintah kabupaten yang telah menerapkan pola baru dalam sistem pelaporan keuangannya, yakni Gorontalo dan Bukittinggi.

Dalam hal ini, IAI sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. IAI telah menjalin kerjasama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia* (PGRI), dalam penerapan standar baru bagi pemerintah daerah, dalam akuntansi keuangan sektor publik yang lebih transparan, bisa dipertanggungjawabkan dan melibatkan partisipasi publik. Diharapkan manajemen organisasi sektor publik ini akan sesuai dengan standar baku akuntansi dan dapat menghasilkan laporan keuangan secara berkala.

Pengembangan sistem pembukuan sektor publik adalah upaya pertama yang dilakukan di Indonesia untuk memperbaiki sistem keuangan berbasis kas tradisional (*cash single entry*) menjadi sistem input ganda berbasis accrual (*accrual double entry*), yang dapat lebih dipertanggungjawabkan. Salah satu manfaat nyata kegiatan ini adalah terwujudnya mekanisme yang akuntabel dan transparan, serta sistem pelaporan yang lebih representatif. Dari kerjasama IAI dan PGRI ini, terlihat bahwa faktor penghambat utama dari pembaruan sistem akuntansi dan keuangan di daerah terletak pada komitmen kepemimpinan dan pembuat kebijakan, bukan pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena dalam pelaksanaannya, ternyata tidak dibutuhkan kualitas SDM yang tinggi.

Bab IV

Perubahan Kurikulum Pendidikan Akuntansi

4.1. Tujuan Pendidikan Akuntansi

Pendidikan akuntansi khususnya pendidikan tinggi akuntansi yang diselenggarakan di perguruan tinggi ditujukan untuk mendidik mahasiswa agar dapat bekerja sebagai seorang Akuntan Profesional yang memiliki pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, Auditing, dan Akuntansi Sektor Publik serta ilmu-ilmu pengetahuan yang relevan dengan bidang akuntansi.

UU SISDIKNAS menyatakan perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki sifat sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagai Akuntan yang harus memiliki kemampuan kompetensi teknik di bidang akuntansi dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan serta memiliki kualifikasi kepribadian yaitu: jujur, berbudi pekerti luhur, dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum yang didisain harus bisa memenuhi kualifikasi tersebut dan perlu dilakukan penyempurnaan kurikulum. Mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa harus senantiasa diperbaharui dan disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Perubahan tersebut diantaranya dilakukan dengan cara mengarahkan mahasiswa untuk memiliki pengetahuan lebih luas dalam sektor perpajakan dan mengarahkan mahasiswa untuk memiliki pengetahuan lebih luas dalam teknologi informasi, baik sebagai operator atau sebagai analis dan desainer sistem informasi.

4.2. Kurikulum Pendidikan Tinggi S1 Akuntansi

Perubahan kurikulum dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini:

1. Pengembangan Kurikulum Jurusan Akuntansi dilakukan dengan membuat sub-sub kelompok staf pengajar sesuai dengan keahliannya.
2. Pembagian sub kelompok mata kuliah kedalam rumpun-rumpun, yaitu:
 - a. Rumpun Akuntansi Keuangan, dengan anggota mata kuliah:
 - i. Pengantar Akuntansi I & II
 - ii. Akuntansi Keuangan I & II
 - iii. Akuntansi Keuangan Lanjutan
 - iv. Teori Akuntansi
 - v. Analisis Laporan Keuangan
 - vi. Akuntansi Topik Khusus
 - vii. Akuntansi Sosial (Pilihan)
 - viii. Akuntansi Internasional (Pilihan)
 - ix. Akuntansi Syariah (Pilihan)
 - b. Rumpun Audit, dengan anggota mata kuliah:
 - i. Auditing I & II
 - ii. Manajemen Audit
 - iii. EDP Audit
 - c. Rumpun Akuntansi Manajemen, dengan anggota mata kuliah:
 - i. Akuntansi Biaya
 - ii. Akuntansi Manajemen
 - iii. Sistem Pengendalian Manajemen
 - iv. Manajemen Strategik
 - v. Akuntansi Manajemen Lanjutan (Pilihan)
 - d. Rumpun Manajemen Keuangan, dengan anggota mata kuliah:
 - i. Manajemen Keuangan
 - ii. Manajemen Keuangan Lanjutan

- e. Rumpun Sistem Informasi, dengan anggota mata kuliah:
 - i. Pengantar Aplikasi Komputer
 - ii. Sistem Informasi Manajemen
 - iii. Sistem Manajemen Database
 - iv. Sistem Informasi Akuntansi
 - v. Metode Analisa dan Perancangan Sistem
- f. Rumpun Perpajakan & Akuntansi Sektor Publik, dengan anggota mata kuliah:
 - i. Perpajakan
 - ii. Perpajakan Lanjutan
 - iii. Akuntansi Sektor Publik
 - iv. Akuntansi Pemerintahan
- g. Rumpun Metodologi Penelitian, dengan anggota mata kuliah:
 - i. Metode Penelitian

Adapun perubahan desain kurikulum dapat dilakukan melalui sekuensial berikut ini:

Kurikulum Semester Ganjil (mata kuliah wajib)

No	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	Pendidikan Agama	2	Tidak Ada
2	Pendidikan Pancasila	2	Tidak Ada
3	Bahasa Inggris	3	Tidak Ada
4	Matematika Ekonomi	3	Tidak Ada
5	PIE Mikro	3	Tidak Ada
6	Pengantar Bisnis	3	Tidak Ada
7	Peng. Aplikasi Komputer	2	Tidak Ada
8	Pengantar Akuntansi I	3	Tidak Ada

9	Akuntansi Keuangan I	3	Ada
10	Statistik II	3	Ada
11	Manajemen Keuangan	3	Ada
12	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3	Ada
13	Sistem Informasi AKuntansi	3	Ada
14	Sistem Manajemen Database	3	Ada
15	Auditing I	3	Ada
16	Akuntansi Biaya	3	Ada
17	Akuntansi Sektor Publik	3	Ada
18	Perpajakan Lanjutan	3	Ada
19	Teori Akuntansi	3	Ada
20	Metodologi Penelitian	3	Ada
21	Manajemen Strategik	3	Ada
22	Analisis Laporan Keuangan	3	Ada
23	EDP Audit	3	Ada
24	Sistem Pengendalian Manajemen	3	Ada

Kurikulum Semester Genap (mata kuliah wajib)

No	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Tidak Ada
2	Bahasa Indonesia	2	Tidak Ada
3	Pengantar Akuntansi II	3	Ada
4	Hukum Bisnis	2	Tidak Ada
5	Statistik I	3	Ada
6	PIE Makro	3	Tidak Ada

7	Pengantar Manajemen	3	Ada
8	Akuntansi Keuangan II	3	Ada
9	Perpajakan/Hukum Pajak	3	Ada
10	Auditing II	3	Ada
11	Akuntansi Topik Khusus	3	Ada
12	Metode Analisis & Perancangan Sistem	3	Ada
13	Metode Penelitian	3	Ada
14	Akuntansi Pemerintahan	3	Ada
15	Manajemen Keuangan Lanjutan	3	Ada
16	Audit Manajemen	3	Ada
17	Sistem Informasi Manajemen	3	Ada
18	Akuntansi Manajemen	3	Ada
19	KKN	3	Lulus 120 Sks
20	Skripsi	3	Lulus 132 Sks

Adapun mata kuliah pilihan yang dapat ditawarkan di Semester Ganjil adalah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	Makro Ekonomi I	3	Ada
2	Mikro Ekonomi I	3	Ada
3	Ekonomi Pembangunan I	3	Ada
4	Akuntansi Sosial	3	Ada
5	Akuntansi Syariah	3	Ada
6	Akuntansi Manajemen Lanjutan	3	Ada

7	Perekonomian Indonesia	3	Ada
8	Pasar Modal & Manajemen Portofolio	3	Ada
9	Manajemen Keuangan Internasional	3	Ada
10	Perilaku Keorganisasian	3	Ada
11	Manajemen Risiko	3	Ada

Sedangkan mata kuliah pilihan yang dapat ditawarkan di Semester Genap adalah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
1	Akuntansi Internasional	3	Tidak Ada
2	Sistem Pendukung Keputusan	3	Ada
3	Perdagangan Internasional	3	Ada
4	Metode Kuantitatif	3	Ada
5	Manajemen Pemasaran	3	Ada
6	Manajemen SDM	3	Ada
7	Manajemen Operasi	3	Ada
8	Studi Kelayakan Bisnis	3	Ada
9	Komunikasi Bisnis	3	Ada

Bab V

Kesimpulan

Keberhasilan proyek kerjasama dalam memperbarui sistem akuntansi dan keuangan di atas telah menumbuhkan minat dan prakarsa dari sejumlah pemerintah daerah lain untuk ikut menerapkannya. Yang tak kalah penting, proyek kerjasama ini telah mendorong terciptanya jaringan yang baik antara IAI dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan pemerintah daerah. Selain itu, juga menjadi langkah awal dari pembaruan administrasi, sebagai bagian dari pembaruan tata pemerintahan di Indonesia.

Singkat kata, jelas masih banyak hal yang bisa dieksplorasi oleh para akuntan Indonesia dalam mengaktualisasikan peran dan kontribusi pengabdianya. Apabila para akuntan Indonesia --dengan dukungan penuh dari IAI dan pemerintah-- dapat proaktif menghadapi berbagai tantangan lokal dan global tersebut, serta kreatif memanfaatkan berbagai peluang yang ada, sumbangan mereka bagi pemulihan ekonomi Indonesia dari kondisi keterpurukan akan sangat berarti.

Perubahan posisi dan peran akuntan ini harus terakomodir dalam perubahan kurikulum pendidikan tinggi akuntansi. Perubahan dilakukan dengan melakukan perubahan kurikulum yang berorientasi pada kompetensi yang diharapkan oleh kebutuhan pasar, baik di bidang sistem informasi, auditing, maupun akuntansi pemerintahan. Perubahan kurikulum juga dilakukan untuk mengakomodir tuntutan internasionalisasi standar akuntansi.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Hadibroto, *Yang Berkepentingan Terhadap Standar: Pelaku Bisnis, Media Akuntansi*, edisi Pebruari-Maret 2003, © IAI Pusat, Jakarta.
- Dede Abdul Hasyir, 2002, *Perwujudan Peran Akuntan Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Meningkatkan Citra Akuntan*, dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Kongres IX IAI 2002, Media Akuntansi, No. 32, Edisi April 2003.
- Idham Samudra Bey, 2002, *Dapatkah AFTA Menjadi Basis Perdagangan Bebas?*, Centre for Agricultural Policy Studies (CAPS).
- Jan Hoesada, 2003, *Indonesia Pada 2003*, Media Akuntansi, edisi Pebruari-Maret 2003, © IAI Pusat, Jakarta.
- Jusuf Halim, 2002, *The Changing Landscape of Accounting Profession*, bahan presentasi pada Sesi Seminar untuk Kongres IAI IX 2002, © KAP Jusuf Halim, Jakarta.
- Kieso, Weygandt, 1999, *Intermediate Accounting 9th Edition*, John-Wiley Inc.
- Maryani dan Ludigdo, 2001, *Sikap dan Etika Profesi Akuntan Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 2, Universitas Brawijaya.
- Mar'ie Muhammad, 2002, *Profesi Akuntan dan Kejahatan Korporasi*, © Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), www.transparansi.or.id.
- Satrio Arismunandar, 2004, *Peran Akuntan Indonesia Menghadapi Tantangan Kondisi Translasi dan Globalisasi*, www.satrio.blogspot.com, tgl. 09 Agustus 2004, page 2, pkl. 15.00.
- Satya Rinaldi, 2003, *How Should Accountant React on Information Technology Issues?*, bahan presentasi pada Sesi Seminar untuk *National Accounting Seminar* 9 September 2003, HIMA Akuntansi UNPAD, © KAP Ernst & Young, Jakarta.
- Referensi dan data terkait lainnya diperoleh dari situs: www.kompas.com, www.suaramerdeka.com, dan www.ilsr.org.